

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

I. Pelaksanaan

Hari/tanggal : Jumat, 7 Februari 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang rapat Puskeu Polri

II. Hasil Kegiatan

Pembukaan oleh Kabid Dal Puskeu Polri Kombes Pol Maya Purnama Ningrum, S.E. selaku Ketua Tim Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan arahan :

1. Dalam rangka Puskeu Polri akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kapuskeu Polri mengeluarkan Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/38/II/KEP./2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.
2. Untuk memenuhi pedoman pelaksanaan pembangunan ZI maka dibentuk Tim kelompok kerja yang mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam kesuksesan pembangunan ZI;
3. Oleh karena itu Kabid Dal ditunjuk sebagai Katim Manajemen Perubahan yang beranggotakan staf Biddal;
4. Seluruh anggota tim diharapkan memahami dan melaksanakan yang menjadi tanggung jawab manajemen perubahan;
5. Produk yang telah dibuat akan dikompulir oleh operator dan diserahkan ke sekretaris.

III. Hasil Rapat

1. Perencanaan ZI  
Perencanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Proses .....

2. Proses Pembangunan ZI

Dilakukan proses penilaian pada satker yang dapat diusulkan mendapatkan predikat Zona Integritas, kemudian satker yang ditunjuk harus dapat memenuhi 2 komponen yaitu pengungkit dan komponen hasil. Maka dibentuk 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Setiap komponen pengungkit mempunyai tanggung jawab masing-masing.

4. Komponen hasil diukur dengan survey eksternal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia serta memperoleh informasi apakah di lingkungan Puskeu Polri telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

IV. Kesimpulan

1. Mengkompulir program kerja yang akan dilaksanakan tiap pokja.

2. Akan dilakukan anev setiap triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan.

V. Penutup

Demikian notulen rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pusat Keuangan Polri disusun untuk diketahui dan ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Jakarta, 7 Februari 2025

NOTULEN



FARADIBAH YUNI WULANDARI H, A.Md  
PENGATUR NIP/199506192020122007